

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK/Provinsi Jawa Timur

Halaman 6

Raih WTP, Masalah Aset Masih Menjadi Atensi

SURABAYA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2018 milik Pemprov Jatim. Hasilnya, seperti tahun lalu, pemprov kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Capaian itu juga menjadi yang kedelapan bagi instansi tersebut. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang diberikan BPK. Sebagian adalah problem lama yang hingga kini tuntas semuanya. Kemarin penyerahan LHP atas LKPD 2018 itu dilangsungkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jatim.

Laporan tersebut diserahkan langsung

oleh anggota V BPK Rim Isma Yatun kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Penyerahan itu turut disaksikan pimpinan dan anggota dewan.

Pemberian opini WTP tersebut tak lepas dari sejumlah kriteria yang berhasil dipatuhi pemprov. Mulai penerapan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap penerapan aturan yang berlaku, hingga pengendalian internal yang efektif.

Selain itu, pemprov dianggap berhasil menindaklanjuti seluruh temuan yang muncul pada LHP terhadap laporan keuangan daerah pada APBD 2017 lalu. Di mana tingkat penyelesaiannya lebih dari 70 persen. "Hal ini patut mendapat

apresiasi. Tentu, kami berharap capaian ini bisa ditingkatkan," ujar Isma Yatun dalam rapat paripurna tersebut.

Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja jajarannya atas capaian tersebut. Menurut dia, jajaran pemprov bisa berkolaborasi dengan legislatif sehingga opini WTP kembali bisa diraih.

Meski begitu, orang nomor satu di Jatim itu mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dibenahi pemprov. "Tentu ini akan jadi bahan koreksi untuk segera dibenahi. Sehingga ke depan pengelolaan keuangan di Jatim makin baik," katanya. (ris/c25/gun)